

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah di Indonesia sudah lama di cita-citakan pendiriannya oleh orang islam, hal ini terungkap dalam keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang diadakan di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1968, majlis Tarjih menyarankan kepada pemimpin pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan agar terwujudnya konsep system perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. Kedudukan bank syariah dalam system perbankan Nasional dibuka setelah keluarnya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam pasal 13 menyatakan bahwa salah satu usaha bank perkreditan rakyat, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan PP No. 72 tahun 1992, tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa bank dengan prinsip bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, sebaliknya bank yang kegiatan usahanya tidak merdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau bagi hasil. (Hak, 2011).

Perbedaan dari Bank Syariah dan Bank Umum yang paling mendasar adalah :

1. Sistem Operasional, semua kegiatan operasi dalam bank syariah yaitu menggunakan ketentuan yang telah dikeluarkan melalui Fatwa MUI yang diambil berdasarkan ketentuansyariat Islam, sedangkan Bank konvensional hal tersebut tidak berlaku. Bank konvensional akan menjalankan berdasarkan standar operasional perbankan yang telah ditetapkan pemerintah.
2. Keuntungan, Bank Syariah tidak menerapkan sistem bunga karena bunga tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Bank syariah menunda bagi hasil. Sedangkan bank konvensional menjalankan usaha secara konvensional dan memberikan keuntungan dalam jumlah tertentu dalam bentuk suku bunga bagi nasabah.
3. Metode Transaksi, transaksi dalam bank syariah berdasarkan Fatwa MUI yaitu dengan menggunakan akad-akad salah satunya yaitu akad mudharabah, sedangkan di bank konvensional tidak ditemukan hal tersebut karena transaksi bank tersebut telah diatur dan menjalankan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Peran perbankan dan lembaga keuangan lainnya sangat menentukan bagi pertumbuhan perekonomian negara. Bank adalah segala hal yang terkait dengan bisnis bank seperti mekanisme pendirian, mekanisme kerja bank, dan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan sebagainya

guna untuk meningkatkan ekonomi masyarakat agar lebih baik. Dalam hal ini, bank mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi dan karena aktivitas bank sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat (Arthesa dan Handiman, 2006)

Bank tersebut dapat menghimpun dana masyarakat dalam bermacam-macam bentuk simpanan kemudian dari dana yang sudah dihimpun tersebut, oleh bank kemudian di salurkan kembali dengan bentuk kredit pada pihak yang membutuhkan atau pada pihak yang ingin memulai bisnis.

Perbankan syariah merupakan bagian dari entitas syariah yang berfungsi sebagai lembaga *intermediary* keuangan diharapkan dapat menampilkan dirinya secara baik dibandingkan dengan perbankan yang berbasis bunga yaitu bank konvensional. Gambaran tentang baik buruknya suatu perbankan syariah dapat dikenali melalui kinerjanya yang tergambar dalam laporan keuangan (Suwiknyo, 2009)

Secara umum konsep perbankan syariah memberikan system perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa perbedaan konsep dalam perbankan konvensional yang dianggap membawa kerugian karena mengandung unsure riba, unsure riba dianggap sangat bertentangan dengan syariat mempromosikan berbagai macam produk yang bebas bunga berupa pembiayaan bagi hasil. (Novi, 2015)

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 13 tentang perbankan syariah, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan

dana dan pembiayaan kegiatan usaha, salah satunya adalah prinsip bagi hasil (mudharabah). Yang mana dalam praktiknya berlandaskan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist yaitu menghilangkan system bunga yang selama ini menjadi kekuatan ekonomi konvensional. Hal ini didasarkan dalam Al-quran surat Al-baqarah ayat 275-276

يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا
 قَلَهُ مَا هِ فَاَنْتَهَى قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّ
 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا (٢٧٥) فَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سَلَا
 (٢٧٦) وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُجِبُ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

276. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”

Akad *mudharabah* pada dasarnya membutuhkan rasa saling percaya yang tinggi antara pemilik dana dan pengelola dana, kemudian pembagian keuntungan harus dalam bentuk presentase (nisbah) yang sudah disepakati. Akad *mudharabah* itu keuntungan disebut nisbah bagi hasil karena besar keuntungannya yang akan diterima oleh pemilik dana dan pengelola dana tidak dapat diketahui dengan pasti. Oleh karena itu besar keuntungannya yang akan diterima tergantung laba yang dihasilkan.

Nurhayati dan Wasilah (2012:120) menerangkan bahwa unsur kepercayaan penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan.

Sistem bagi hasil lebih adil disebabkan oleh tingkat keuntungan yang didistribusikan kepada pemilik modal disalurkan berdasarkan tingkat keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh *mudharib*. Sedangkan sistem bunga tidak memandang dari sisi keuntungan atau kerugian usaha yang dijalankan. Sistem bunga mewajibkan peminjam harus membayar cicilan kredit beserta bunga atas pinjaman tersebut tanpa memperhatikan apakah usaha yang dijalankan tersebut mengalami rugi atau untung.

Non performing financing (NPF) adalah sering kali dikaitkan dengan risiko kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Debitur mengalami keadaan dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan bank. NPF naik di tiap tahunnya meskipun mengalami penurunan

pada tahun 2012 sebesar 0,3% namun setelah itu mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebesar 1,71% dan tetap mengalami kenaikan hingga tahun 2015 meski tidak secara drastis. Kredit bermasalah biasanya timbul dari penunggakan nasabah yang melebihi ambang batas. Bila seharusnya nasabah akan mengembalikan uangnya tanggal 2 Januari, nasabah malah tidak membayarnya sama sekali.

Dana Pihak Ketiga (DPK) bisa disebut juga dana masyarakat karena diperoleh dari masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, sekolah, yayasan dan lain-lain baik dalam rupiah ataupun mata uang asing. Sumber dana ini sangat penting atau biasa disebut dengan sumber utama dalam kegiatan operasional suatu bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito atau dalam bentuk lainnya.

Bank syariah juga mempunyai berbagai macam produk yang dapat digunakan oleh para masyarakat. Diantaranya ialah produk pendanaan, pengkreditan, penyimpanan, dan produk lainnya yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan yang dilakukan biasanya berdasarkan besar kecilnya dana pihak ketiga yang ada di lembaga keuangan syariah. Untuk itu, disini penulis ingin meneliti dengan Judul **“Analisis Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan Non Performing Financing (Npf) Dan Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Periode Tahun 2015-2018”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan pembiayaan di bank Bank Umum Syariah tahun 2015-2018?

C. Tujuan Penelitian

Menganalisis perkembangan Dana Pihak ketiga, *Non Performing Financing* dan pembiayaan di bank Bank Umum Syariah tahun 2015-2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Menambah wawasan untuk berpikir mengenai teori.
- b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengetahui bagaimana Dana Pihak ketiga, *Non Performing Financing* dan pembiayaan di bank Bank Umum Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi masukan agar menjadi lebih baik kedepannya untuk melakukan pembiayaan yang berbasis murabahah di bank umum syariah.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pihak Bank agar menyediakan banyak informasi yang benar-benar dan menjadi salah satu dari pilihan masyarakat untuk mengambil keputusan dalam melakukan pembiayaan yang berbasis murabahah

3. Manfaat Akademis

Dapat memberikan kontribusi kepada pembaca dalam menyalurkan dana pihak ketiga melalui pembiayaan yang berbasis murabahah di perbankan syariah.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penellitian, maka peneliti perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian “ Analisis Dana Pihak Ketiga, *Non performing Financing*, dan Pembiayaan di Bank Umum Syariah Periode 2015-2018”. Adapun penjelasan sekaligus pembatasan istilah untuk masing-masing Variabel tersebut adalah:

A. Dana Pihak Ketiga

- a. Dana Pihak Ketiga adalah Dana Masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha (Sudardjo,2014).
- b. DPK Merupakan tugas perbankan untuk menghimpun dana dari masyarakat (Ascarya,2011).
- c. Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, tabungan, dan bank (SEBI No.6/23/DPNP tgl. 31 Mei 2004).
- d. Yang dimaksud dana Pihak Ketiga dalam penelitian ini adalah dana Pihak Ketiga di bank umum syariah pada tahun 2015-2018 meningkat apa menurun.

B. *Non Performing Financing*

1. *Non Performing Financing* disebut juga pembiayaan bermasalah, kredit macet artinya NPF adalah suatu pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan tidak lancar (Hidayati, 2003)
2. *Non Performing Financing* Sebagai suatu pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan tersendar-sendat dan tidak memenuhi

kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan krediy yang sulit dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih (Hidayati, 2013).

C. pembiayaan

1. Pembiayaan (mudharabah) berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha (Dwi Suwiknyo, 2010).
2. Pembiayaan (Mudharabah) merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yaitu pihak pertama (pemberi dana) dan kedua (Pengelola dana) (Dwi Suwiknyo, 2010).
3. Pembiayaan (Mudharabah) merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) (Ismail, 2011).

F. Asumsi dasar Penelitian

Penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu diantara lain:

BAB I Pendahuluan : membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan maslah penelitian.

BAB II Kajian pustaka : membahas tentang landasan teori mengenai perbankan syariah, dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan pemmbiayaan mudharabah.

BAB III Metode penelitian : membahas tentang jenis penelitian dan sumber data, devisi operasional variable, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV Pembahasan : dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang pengujian data dari analisis terhadap data.

BAB V Kesimpulan dan Saran :peneliti memberikan kesimpulan dari apa yang telah dibahas di bab sebelumnya serta member saran.